

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam sebuah karya penelitian, salah satunya seperti karya tulis berupa skripsi, tidak ada yang bersifat mutlak asli dan benar-benar baru dihasilkan oleh seorang penulis maupun peneliti, dimana penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh penelitian yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyadari pentingnya melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang digarap.

Pada bagian literatur review ini penulis akan berfokus terhadap literasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk melihat keterbaharuan terdahulu, penulis mengajukan tiga penelitian terdahulu, literatur pertama berjudul “**Alasan Tiongkok Menghentikan Impor Sampah Plastik Polietilena Tereftalat (PET) Tahun 2018**” yang ditulis oleh A.A Gede Agung Bharata W, D.A Wiwik Dharmiasih, dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Dalam literatur tersebut dijelaskan bahwa China mengimpor 45 persen dari total sampah plastik dunia setiap tahunnya untuk industri tekstil dan pakaian mereka (Brooks et al., 2018). Hasil daur ulang dari sampah plastik tersebut merupakan bahan utama pembuatan benang dan serat fiber poliester (Han et al., 2016). Terdapat dua alasan yang menyebabkan tingginya impor sampah jenis PET oleh China yaitu, bergabungnya China ke *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001 dan adanya tren peningkatan

permintaan pasar terhadap produksi benang dan serat fiber poliester yang mendorong China untuk memperbanyak jumlah impor sampah plastik. Namun, pada tahun 2018 China menghentikan impor benang dan serat fiber poliester bersamaan dengan diresmikannya sebuah kebijakan larangan impor sampah bernama *Blue Sky*. Penerapan kebijakan ini telah memberikan pengaruh besar terhadap negara-negara yang mengespor sampah plastik sebab mereka sudah sangat bergantung kepada China dalam hal ini.

Penerapan larangan impor sampah ini membawa dampak positif seperti peningkatan PDB China yang berpengaruh pada perkembangan kesejahteraan hidup rakyat China pada setiap tahunnya. Selain dampak positif, industri tekstil China juga membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar perindustrian tersebut. Proses daur ulang sampah plastik yang menyebabkan polusi udara turut meningkatkan kerugian domestik China dalam bidang kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan pengeluaran biaya kesehatan oleh Pemerintah China setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa China terus merugi akibat dari impor sampah yang dilakukannya. Dengan menghentikan impor sampah ini, China dapat meminimalisir kerugian yang berupa materi maupun SDM yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

Literatur ini berpendapat bahwa langkah yang diambil China untuk menerapkan kebijakan larangan impor sampah ini adalah sebuah langkah yang rasional dengan mengutip Leoveanu, di mana dia berkata bahwa aktor yang bertindak rasional akan selalu bertindak demi memaksimalkan keuntungan dengan melakukan komparasi untung rugi untuk mengeliminasi

instrumen penyebab kerugian. Komparasi untung rugi tersebut dilakukan dengan membandingkan pengeluaran terhadap keuntungan ekspor tekstil dengan kerugian kesehatan China dari tahun 2006 sampai 2015 di mana instrumen penyebab kerugian China sendiri merupakan impor sampah plastik asing yang telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya, literatur kedua dengan judul “*Chinese Ban on Importation of Waste Products: A Focus on the Future of Plastic Waste*” yang ditulis oleh Maureen Ngozi Agbasi menjelaskan bahwa penggunaan plastik di zaman sekarang sudah tidak dapat dihindari lagi kecuali seluruh lapisan masyarakat memiliki kesadaran dan keinginan untuk mengurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan bahan baku yang murah, mudah dibentuk, dan tahan lama sehingga plastik menjadi incaran sektor pengemasan segala macam produk kebutuhan manusia. Namun, dikarenakan oleh faktor ketahanannya, plastik juga merupakan salah satu bahan yang berbahaya bagi lingkungan.

Dalam beberapa dekade terakhir, China merupakan importir sampah plastik terbesar di dunia sebelum China mengumumkan kebijakan larangan impor sampah mereka kepada *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2017. Alasan dikeluarkannya kebijakan ini dikarenakan oleh dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan impor sampah asing terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup rakyat China.

Setelah penerapan kebijakan yang disebut *The National Sword* ini, perusahaan daur ulang China kekurangan bahan untuk diolah sebab limbah domestik China hanya berjumlah sekitar seperempat dari yang biasanya

China impor. Tidak hanya bagi China, kebijakan ini telah berdampak besar terhadap negara-negara eksporter sampah seperti Australia.

Tulisan ini berpendapat bahwa kebanyakan negara yang mengekspor sampah ke China tidak memikirkan permasalahan pengolahan limbah mereka sendiri sebab sudah terbiasa dengan fasilitas daur ulang yang disediakan oleh China. Kini dengan adanya larangan tersebut, masing-masing negara harus mulai mengatasi permasalahan limbah mereka sendiri. Individu pun juga seharusnya didorong untuk terlibat dalam penyortiran sampah rumah tangga.

Akan tetapi, prosedur pemilahan sampah hanyalah tindakan jangka pendek yang memiliki dampak minimal dalam penanganan limbah plastik. Di Amerika Serikat sendiri, industri petrokimia telah menginvestasikan sebanyak \$164 miliar dalam ekspansi infrastruktur untuk membuat lebih banyak plastik. Industri plastik diduga akan bertambah sebanyak hampir empat kali lipat pada tahun 2050. Daur ulang tidak akan menghasilkan input yang cukup. Bahkan saat ini, daur ulang hanya menyerap sekitar 9 persen plastik yang diproduksi sejak 1950. Oleh karena itu, solusi yang sebenarnya adalah dengan mengurangi pemakaian dan pembuatan plastik.

The Global Alliance for Incinerator Alternatives atau Aliansi Global untuk Insinerator Alternatif (GAIA) menyampaikan kritik terhadap negara-negara pengeksport sampah mengenai adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan skenario baru dalam menghadapi epidemi plastik dan membuangnya (limbah) di negara lain bukanlah suatu pilihan. Langkah China dalam menerapkan larangan impor sampah dinilai sebagai sebuah langkah

yang logis dalam mengurangi produksi plastik. Hal ini harus dipertimbangkan oleh berbagai pihak sebab walaupun produksi plastik dengan menggunakan ekstraksi fosil akan lebih murah, pembersihan lingkungan yang telah terdegradasi oleh plastik tidak akan murah.

Solusi lain dalam menghadapi permasalahan ini adalah dengan menerapkan standarisasi plastik sehingga semua plastik yang ada memiliki kualitas yang sama. Hal ini dikarenakan negara-negara produsen merasa lebih mudah untuk mendaur ulang plastik berkualitas tinggi dan mengirim plastik berkualitas rendah ke Asia dan tujuan lainnya. Oleh karena itu, apabila terdapat standarisasi plastik maka negara-negara produsen akan cenderung mendaur ulang limbah mereka sendiri sehingga hal ini akan mengurangi polusi di tujuan ekspor.

Selain itu dalam menghadapi dampak dari penerapan kebijakan larangan impor sampah China, negara-negara eksporter disarankan untuk saling bekerjasama untuk melakukan ‘ekonomi sirkular’ karena dengan menerapkan sistem tersebut maka baik suatu negara maupun lingkungan akan sama-sama diuntungkan.

Yang terakhir, literatur berjudul “*China: the World’s Largest Recyclable Waste Impoter*” oleh Aya Yoshida menjelaskan tentang bagaimana China mengolah sampah-sampah impor sehingga mendapatkan julukan ‘tempat sampah dunia’. Impor sampah yang dilakukan oleh China telah berlangsung sejak tahun 1966 dengan volume terbesar berasal dari Jepang dan Hong Kong, di mana kedua negara tersebut telah menyumbang

lebih dari 80 persen dari semua impor yang berasal dari Asia. Kemudian pada tahun 2000 terdapat peningkatan ekspor yang signifikan dari Eropa ke China, di mana Jerman, Belgia, dan Belanda menjadi eksportir utama di semua kategori produk. Negara-negara Eropa lain seperti Perancis, Italia, Inggris dan Spanyol juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Amerika Serikat mengekspor jumlah kertas bekas yang jauh lebih besar ke China daripada wilayah lain.

Secara garis besar, aliran sampah asing ke China dan insiden yang mengakibatkan kembalinya pengiriman limbah ke negara asalnya terjadi dalam dua pola. Pertama, ada kiriman sampah yang diimpor tanpa melewati pabean dan beberapa barang ekspor yang tidak dikenali jenisnya. Pejabat pabean dan pemerintah daerah telah menerapkan metode penegakan hukum, yaitu dengan menutup pangkalan daur ulang ilegal dan sebagainya, dalam upaya untuk menghentikan penyelundupan, tetapi di Provinsi Guangdong, misalnya, lalu lintas barang elektronik dan peralatan listrik selundupan yang ilegal tetap merajalela. Ada laporan bahwa televisi CRT (*cathode-ray tube*) yang tidak dapat digunakan diekspor ke Hong Kong sebagai barang bekas, diselundupkan ke China atau diekspor ke daratan setelah dibongkar di Hong Kong. Kedua, ada kasus sampah impor ilegal yang secara salah dilabeli sebagai 'plastik bekas' atau 'kertas bekas' padahal kiriman yang ada terkontaminasi oleh sampah rumah tangga. Untuk mengatasi hal itu, China mengembalikan kontainer berisi sampah yang sudah tercampur tersebut ke negara asalnya. Namun masalahnya dengan pengiriman kembali terletak pada mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dan ke mana harus

mengembalikan pengiriman tersebut. Dengan adanya lalu lintas barang selundupan, dalam banyak kasus, negara-negara pengekspor tidak diketahui atau barang-barangnya dicap berasal dari Hong Kong, sehingga membuatnya sulit untuk dikirimkan kembali ke negara asal.

Dalam mengatasi permasalahan impor limbah, China telah menetapkan berbagai jenis peraturan impor limbah yang memiliki dua undang-undang dasar, yaitu “Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Padat” dan “Ketentuan Sementara tentang Administrasi Perlindungan Lingkungan di Impor Bahan Limbah” yang keduanya diberlakukan pada tahun 1996. Undang-undang ini juga memiliki sistem lisensi impor, memerlukan inspeksi pracetak dan telah mengeluarkan pedoman (dalam bentuk ultimatum) tentang impor limbah.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan mengenai analisis bahwa tenaga kerja yang murah dan permintaan yang tinggi merupakan alasan China melakukan impor sampah dari luar negeri. Namun karena teknologi daur ulang di China belum memadai, aktivitas daur ulang yang ada justru menyebabkan pencemaran lingkungan. Belum lagi masuknya arus sampah impor ilegal yang tidak memenuhi persyaratan impor China. Untuk mengatasi hal tersebut, China mengambil berbagai langkah dalam berupaya mencegah pencemaran lingkungan, seperti adanya sistem lisensi impor, larangan impor limbah peralatan rumah tangga, standar ekspor, dan persyaratan inspeksi pra-pengiriman limbah. Hal itu tidak terlalu mempengaruhi arus sampah ilegal

yang masuk ke wilayah China sebab penegakan atas peraturan yang terakut tidak memadai dan tidak ada pemahaman bersama mengenai limbah yang dapat didaur ulang di antara negara-negara pengekspor dan pengimpor. Oleh karena itu, China harus terus memperketat peraturan mengenai impor limbahnya agar arus limbah asing ilegal dapat dikurangi atau dihilangkan secara seutuhnya.

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk memenuhi kaidah – kaidah keilmuan serta mempermudah proses penelitian, peneliti perlu memaparkan teori – teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini.

Berkembangnya anggapan bahwa isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang harus dikaji mendorong kemunculan *Green Political Theory* atau teori politik hijau. Teori ini diperkirakan muncul sejak tahun 1960-an atau sekitar abad 20 oleh Jackson & Sorensen dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations*. Menurut Jackson & Sorensen, teori ini muncul pasca Perang Dingin yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan secara berlebihan (Rahmadani, 2019).

Teori politik hijau merupakan sebuah pemikiran baru yang lahir setelah adanya paham environmentalisme. Menurut Ernst Hackel (1873), environmentalisme dengan teori politik hijau merupakan pandangan yang saling bertolak belakang. Environmentalisme memandang bahwa kepentingan lingkungan hidup untuk sepenuhnya kepentingan umat manusia, sedangkan teori politik hijau beranggapan bahwa manusia merupakan bagian

dari alam (ekosentrisme) maka manusia harus menjaga lingkungannya (Lestari, 2016).

Kemudian Matthew Patterson (1996) juga memiliki penjelasan mengenai perbedaan dari kedua pandangan tersebut. Menurutnya, environmentalisme menerima kerangka kerja yang ada dalam realitas politik, sosial, ekonomi, serta struktur normatif yang ada dalam dunia politik dan gerakan ini mencoba mengatasi permasalahan lingkungan dengan struktur yang sudah ada. Sementara itu, teori politik hijau berpendapat bahwa struktur yang sudah ada tersebut malah menyebabkan krisis lingkungan sehingga struktur ekonomi, politik, dan sosial membutuhkan perubahan dan perhatian yang lebih utama (Lestari, 2016).

Patterson menjelaskan bahwa teori politik hijau ini memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi pertama mengacu pada penolakan terhadap konsep *anthropocentric* atau *human-centered*. Teori ini meyakini bahwa segala kebaikan yang ada di alam hanya berpusat pada manusia, sehingga manusia cenderung untuk bertindak eksploitatif terhadap alam untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, teori politik hijau menolak asumsi pertama karena jelas sangat merugikan alam. Asumsi yang kedua adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berpengaruh pada semakin berkurangnya lahan karena dijadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian asumsi terakhir adalah konsep desentralisasi di mana konsep ini percaya bahwa apabila suatu negara dengan banyak anggota penduduk tidak dapat melakukan perbaikan lingkungan, maka dibutuhkan komunitas yang

lebih kecil lagi untuk mewujudkan kelestarian lingkungan tersebut (Seta, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa teori politik hijau ini memandang bagaimana aktivitas yang dilakukan manusia dapat berpengaruh pada lingkungan sekitarnya, serta bagaimana aktivitas manusia dapat memiliki dampak hingga melewati batas-batas negara (Seta, 2015).

Teori politik hijau dilaksanakan oleh pemimpin negara sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup. Teori ini juga memiliki gagasan ekosentrisme yang menolak gagasan antroposentrisme. Ekosentrisme adalah bentuk 'emansipasi' terhadap semua entitas yang ada, oleh karena itu manusia tidak boleh mendominasi dan mengganggu keseimbangan alam. Dalam teori politik hijau, sustainability yang dimaksud bukanlah mengacu pada pembangunan, namun pada keseimbangan ekologi, manusia dan makhluk hidup lainnya. Teori ini meyakini bahwa dengan menjaga keseimbangan ekologi dan menyelamatkannya dari krisis, pada hakekatnya akan melindungi manusia itu sendiri.

Hal-hal tersebut dapat dicerminkan dengan perilaku China dan Australia yang berupaya untuk menjaga keseimbangan alam dengan menuangkan isu lingkungan ke agenda politik. China memulai dengan mengeluarkan kebijakan larangan impor sampahnya yang memberi pengaruh besar bagi seluruh dunia untuk memberi kesadaran akan pentingnya isu lingkungan. Respon Australia dalam menghadapi pengaruh kebijakan larangan impor sampah China pun merupakan cerminan dari penerapan teori

politik hijau. Australia telah berupaya untuk bertanggung jawab akan limbahnya sendiri dengan cara meningkatkan sistem pengelolaan limbahnya, mengurangi pemakaian plastik dan mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan limbah plastik dalam *National Plastic Summit*, serta merealisasikan *National Waste Policy Action Plan* dengan menerapkan kebijakan larangan ekspor sampah secara bertahap pada tahun 2021 mendatang. Maka dari itu, teori politik hijau akan tepat sebagai pendamping dari tulisan ini.

Selain itu, penerapan kebijakan larangan impor sampah oleh China yang berpengaruh terhadap negara-negara lain, di mana dalam kasus ini adalah Australia, merupakan cerminan dari teori *global shift*.

Globalisasi merupakan sebuah ide dan prediksi dari Karl Marx yang berpengaruh yang signifikan dari teori *global shift*. Salah satu dampak dari globalisasi adalah munculnya kaum *hyper-globalis* yang meyakini bahwa kita hidup di dunia yang tidak memiliki batas di mana istilah ‘nasional’ tidak lagi relevan. Mereka juga percaya bahwa negara bangsa bukan lagi aktor yang signifikan ataupun unit ekonomi yang berarti sebab perusahaan global telah membuat standarisasi produk global yang menjadikan mereka sebagai aktor yang sangat penting dalam globalisasi. Akan tetapi, perspektif strukturalisme yang dianut dalam tulisan ini dapat disebut sebagai anti globalisasi yang percaya bahwa globalisasi bukanlah sebuah solusi, melainkan masalah sebab pasar bebas menciptakan ketidakadilan (Dicken, 2011).

Globalisasi adalah pertukaran pandangan terhadap dunia melalui proses integrasi internasional. Proses ini melibatkan integrasi banyak hal, seperti ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, dan sebagainya. Dengan adanya integrasi tersebut maka akan terciptanya ketergantungan dalam aktivitas ekonomi dan budaya, seperti dalam kasus impor sampah yang dilakukan oleh China (Welianto, 2019).

Sederhananya, teori *global shift* digambarkan dengan adanya pertukaran materi dari negara *periphery*, yang merupakan sumber bahan mentah dan barang manufaktur, ke negara *core* yang merupakan produsen yang akan mengolah dan menjual kembali barang-barang mentah tersebut ke negara *periphery* (Dicken, 2011). Hal inilah yang terjadi di antara China dengan negara-negara eksporter sampah seperti Australia. Dengan adanya proses pertukaran ini maka terciptanya juga ketergantungan oleh kedua belah pihak di mana China membutuhkan sampah impor untuk didaur ulang menjadi bahan mentah dan produk baru yang kemudian dibeli oleh Australia. Ketergantungan tersebut pun terganggu dengan adanya penerapan kebijakan larangan impor sampah oleh China sehingga hal ini pun sangat berdampak bagi Australia yang sudah terbiasa mengirim sampahnya ke luar negeri, termasuk ke China, dibandingkan mengolahnya sendiri.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini berfokus terhadap pengambilan keputusan oleh Australia dalam merespon pengaruh dari penerapan kebijakan larangan impor sampah asing China terhadap negara-negara eksporter sampah.

China mulai melakukan impor sampah asing sekitar tahun 1980-an dan 1990-an di mana pada saat itu sektor swasta di China sedang berkembang dengan pesat. Sampah-sampah impor dibawa ke daerah yang kurang berkembang secara ekonomi untuk diproses kembali menjadi bahan baku. Salah satu alasan China melakukan impor sampah asing tersebut disebabkan oleh kualitas barang-barang impor jauh lebih bagus dibandingkan yang mereka miliki di negara sendiri. Tidak hanya China, pihak eksporter seperti negara Amerika Serikat, Inggris dan Australia juga mendapat keuntungan di mana biaya yang mereka gunakan untuk mengirim sampah mereka ke China jauh lebih murah dibandingkan apabila mereka harus memproses sampahnya sendiri (Mak, 2018).

Dengan bergabungnya China ke dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, impor sampah asing langsung melonjak drastis. Industri yang meningkatkan perekonomian domestik China ini langsung tumbuh dengan jumlah pekerja sekitar 3 sampai 5 juta orang. Namun pemerintahan China kini melihat industri daur ulang sebagai industri dengan nilai yang rendah sehingga mereka beralih ke industri teknologi yang lebih menguntungkan. Selain itu, industri daur ulang ini juga menyebabkan polusi lingkungan yang parah sehingga berdampak buruk pada kondisi kesehatan dan masyarakat di China (Brooks et al., 2018).

Dengan bergabungnya China ke dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, impor sampah asing langsung melonjak drastis. Industri yang meningkatkan perekonomian domestik China ini langsung tumbuh dengan jumlah pekerja sekitar 3 sampai 5 juta orang.

Namun pemerintahan China kini melihat industri daur ulang sebagai industri dengan nilai yang rendah sehingga mereka beralih ke industri teknologi yang lebih menguntungkan. Selain itu, industri daur ulang ini juga menyebabkan polusi lingkungan yang parah sehingga berdampak buruk pada kondisi kesehatan dan masyarakat di China (Brooks et al., 2018).

Menteri Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan bahwa penerapan larangan dan pembatasan impor limbah padat merupakan sebuah langkah penting yang diambil China untuk menerapkan konsep pembangunan baru untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan menjaga kesehatan masyarakat. Hua juga menyampaikan bahwa membatasi dan melarang impor limbah padat adalah langkah penting yang telah diambil Tiongkok untuk menerapkan konsep pembangunan baru, meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakatnya. Langkah yang diambil China ini juga sudah diatur dalam Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya bahwa setiap negara memiliki hak untuk melarang masuknya limbah berbahaya asing dan jenis limbah lainnya (China Daily, 2018).

Dari sederet kebijakan mengenai impor limbah yang telah ditetapkan, China baru mulai mengesahkan kebijakan yang tegas terhadap limbah asing pada tahun 2010 (Chinese Ministry of Environmental Protection, 2009). Kemudian pada tahun 2013, China menerapkan *Operation Green Fence* (OGF) di mana operasi ini memberlakukan pembatasan sementara terhadap impor limbah yang sedikit terkontaminasi. Selain untuk melindungi lingkungan sekitar, operasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas limbah

yang diterima oleh China dan juga mengurangi penyelundupan serta perdagangan sampah asing ilegal (Velis, 2014b). *Operation Green Fence* bukanlah hal yang baru dan kebijakan ini membantu penegakan peraturan yang telah diberlakukan sebelumnya pada April 2011, lebih tepatnya pada pasal 12 yang berbunyi, “Dalam proses limbah padat, langkah-langkah harus diambil untuk mencegah barang-barang impor merembes dan bocor atau tindakan lain untuk menjaga lingkungan.” Setelah berlakunya operasi ini, Amerika Serikat dan Eropa mulai mengirim bahan daur ulang yang memiliki kualitas lebih baik. Hal ini membantu pabrik-pabrik di China untuk menurunkan biaya daur ulang sebab apabila suatu bahan sulit atau bahkan tidak bisa didaur ulang maka biaya yang dikeluarkan oleh pabrik akan lebih tinggi.

Walaupun *Operation Green Fence* berhasil mencapai tujuannya dalam membatasi perdagangan sampah legal, hal ini justru tidak bisa menghentikan dan malah meningkatkan arus sampah asing ilegal yang masuk ke wilayah China (Brooks et al., 2018).

Karena *Operation Green Fence* ini bersifat sementara, China pun mengeluarkan kebijakan impor sampah baru yang diterapkan secara permanen untuk melarang impor limbah plastik non-industri (Chinese Ministry of Environmental Protection, 2017). Berdasarkan pernyataan dari Dewan Negara China, tujuan utama dari kebijakan baru ini adalah untuk melarang impor limbah padat yang dapat diganti dengan sumber daya domestik yang ditargetkan pada tahun 2019 (Ritchie, 2018). Kebijakan ini disebut dengan *The National Sword* di mana China melarang 24 jenis sampah

impor yang secara resmi diterapkan pada Januari 2018. Kementerian Ekologi dan Lingkungan China (MEE) mengumumkan larangan impor terhadap 32 jenis bahan bekas yang mereka sebut sebagai “limbah padat”. Enam belas bahan, seperti potongan logam yang termasuk di dalam “Kategori 7”, dilarang pada 31 Desember 2018. Kemudian 16 jenis limbah lainnya, termasuk beberapa bentuk skrap baja tahan karat, dilarang pada 31 Desember 2019 (Redling, 2018).

Kebijakan tersebut diikuti dengan *Blue Sky Operation* China memiliki target untuk mengurangi impor limbah padat secara total pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mengurangi polusi dan mendorong para pendaur ulang untuk mengolah volume sampah domestik yang melonjak (Xu & Stanway, 2019). Pada Juli 2018, Dewan Negara China mengumumkan bahwa China akan memperluas kontrol polusi ke 82 kota di seluruh China dengan mengeluarkan rencana *Blue Sky* ini (Suratman, 2018).

Dengan diterapkannya *Blue Sky*, para pencemar akan menerima sanksi dengan adanya penetapan sistem harga nasional untuk emisi karbon dan pencemaran air. Sistem transportasi hijau juga akan dikembangkan untuk menghasilkan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dengan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan intensitas emisi yang rendah (Suratman, 2018).

Qiu Qiwen, direktur divisi limbah padat Kementerian Ekologi dan Lingkungan China, mengatakan bahwa China memiliki rencana untuk semakin memperketat pebatasan impor limbah dan akan mewujudkan impor

nol limbah pada tahun 2020. Pada bulan Desember 2018, China juga berjanji untuk melarang lebih banyak jenis impor seperti baja, tembaga dan aluminium mulai dari Juli serta veto akan diperluas ke produk-produk seperti baja tahan karat dan titanium pada akhir tahun. Tujuan China melakukan hal ini adalah untuk memblokir impor semua produk limbah dalam negeri. Produk yang tidak termasuk dalam daftar terlarang juga akan dibatasi tahun depan, tetapi bahan berkualitas tinggi tertentu masih akan diterima (Xu & Stanway, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan sampah yang merupakan salah satu masalah utama mereka, China mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dimulai dari *Operation Green Fence* pada tahun 2013 yang diikuti oleh kebijakan *National Sword* yang disahkan pada tahun 2016 namun baru berjalan secara sah dan efektif dari Januari 2018 di mana China melarang 24 kategori limbah padat dan hanya menerima limbah dengan tingkat kontaminasi (dengan bahan lain) sebesar 0,05 persen dari yang sebelumnya sebesar 10 persen (Dunn, 2018). Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh China adalah *Blue Sky* di mana selain menjaga lingkungan China dari polusi udara, China juga berupaya untuk mendorong kemajuan teknologi dengan menerapkan sistem transportasi hijau. Akan tetapi, larangan impor sampah yang diterapkan oleh China memberi dampak yang sangat besar, khususnya bagi negara-negara eksportir sampah yang dari dulu hanya mengandalkan China untuk mengolah sampah mereka masing-masing. Di antara daftar negara-negara pengekspor sampah ke China, Australia adalah salah satunya.

Dalam mengatasi permasalahan limbah domestiknya, Australia telah melakukan pembatasan impor pada tahun 2016 dengan memproses 12% limbah daur ulang dalam negeri dan mengirim 1,25 juta ton limbah ke China atau menyimpan sebagian limbahnya di TPA dalam negeri (Early, 2020). Setelah China mengesahkan serangkaian kebijakan larangan sampahnya, negara-negara eksporter sampah, termasuk Australia, mengalihkan kegiatan ekspor mereka ke kawasan Asia Tenggara.

Australia mengekspor sekitar 1,3 juta ton bahan daur ulang ke China, yaitu sekitar sepertiga dari plastik yang dapat didaur ulang dan kertas serta karton, saat China mengumumkan pembatasan impor bahan daur ulang pada tahun 2017 (ABC, 2019). Setahun setelahnya, India yang menempati posisi keempat dalam daftar pengimpor sampah Australia terbesar setelah Vietnam, Indonesia, dan China, segera mengikuti langkah China dalam melakukan larangan impor sampah (Trinh & Pickin, 2019). India telah memberlakukan larangan penuh terhadap impor limbah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah limbah negara dengan kapasitas daur ulang yang ada (Arora, 2019). Vietnam sebagai negara pengimpor sampah Australia terbanyak juga mengumumkan penghentian untuk mengeluarkan lisensi baru untuk impor limbah dan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, juga menjanjikan investigasi terhadap pengimpor sampah ilegal (Saigoneer, 2019). Pada April 2019, Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa mereka akan berupaya untuk melarang impor limbah pada tahun 2025 secara sepenuhnya (Saigoneer, 2019). Kemudian pada bulan September 2019, Indonesia mengembalikan 100 kontainer limbah yang terkontaminasi ke Australia

sebagai bentuk ketegasan dalam menghadapi permasalahan limbah ilegal. Malaysia juga telah memulangkan 150 kontainer limbah plastik ilegal ke negara-negara asalnya pada akhir Januari 2020.

Dengan banyaknya kasus sampah asing ilegal, maka dibuatlah perubahan pada Konvensi Basel yang akan mulai berlaku pada tahun 2021 untuk mengharuskan para eksportir sampah agar mendapatkan persetujuan dari pihak importer sebelum melakukan pengiriman plastik yang digolongkan "sulit" untuk didaur ulang (Crawford & Warren, 2020). Hal-hal mengenai ekspor plastik sudah diatur di dalam Konvensi Basel, di mana negara-negara eksporter sampah hanya diperbolehkan untuk mengimpor sampah yang bersih, disortir, dan dapat didaur ulang. Namun hal itu tidak selalu diperhatikan sehingga negara-negara eksporter sampah, atau bahkan sengaja dilakukan, sehingga akhirnya negara-negara importer sampah mulai bersikap tegas dalam menghadapi hal tersebut.

Penerapan kebijakan larangan impor sampah yang dipelopori oleh China telah menciptakan permasalahan baru bagi negara-negara eksporter sampah yang sudah lama bergantung terhadap China. Belum lagi kebanyakan negara-negara importer sampah lainnya sudah mulai memiliki kesadaran bahwa sampah asing telah banyak membuat kerugian sehingga mereka juga mengikuti langkah China dalam menerapkan pembatasan atau bahkan larangan impor sampah. Dalam menghadapi hal tersebut, Pemerintah Australia menyusun kebijakan limbah nasional yang memiliki target untuk memulihkan 80% dari seluruh jenis limbah domestik yang ada. Tetapi menurut badan industri Asosiasi Pengelolaan Limbah Australia (WMAA),

penerapan kebijakan ini memiliki hambatan dalam pelaksanaannya sebab akan membutuhkan investasi sebesar AUS \$ 150 juta dari pemerintah negara bagian dan federal (Early, 2020).

Pemerintah negara bagian dan federal Australia sepakat untuk merilis jadwal larangan ekspor terhadap berbagai jenis limbah seperti plastik, kertas, gelas dan ban secara bertahap (Australian Government Departement of Agriculture Water and the Environment, 2020b). Larangan ekspor ini memiliki kemunduran akibat adanya pandemi COVID-19 yang menghambat Pemerintah untuk mengesahkan larangan ini pada Juli 2020. Maka dari itu, pengesahan larangan ini akan diundur menjadi Januari 2021,

Larangan ekspor yang akan diberlakukan oleh Australia akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenisnya. Dimulai dari limbah kaca yang tidak diproses pada Januari 2021, plastik campuran pada Juli 2021, seluruh jenis ban pada Desember 2021, resin tunggal/plastik polimer pada Juli 2022, kertas dan kardus campuran yang tidak disortir pada Juli 2024 dan larangan ekspor terhadap semua jenis limbah padat ditargetkan pada Juli 2024 (Australian Government Departement of Agriculture Water and the Environment, 2020b). Kebijakan tersebut mencakup komitmen yang dapat menentukan apakah Australia mampu untuk memiliki kapasitas untuk menghasilkan komoditas daur ulang bernilai tinggi. Kepala Menteri Wilayah Australia Utara, Michael Gunner, mengatakan bahwa mereka (Pemerintahan Australia) tidak melihat sampah sebagai suatu masalah melainkan sebagai sebuah peluang bagi banyak orang (Doran & Macmillan, 2019).

Selain itu, Pemerintah Australia melaksanakan *National Plastic Summit* sebagai upaya lain dalam menangani permasalahan limbah plastik. Forum tersebut terdiri dari 200 delegasi terpilih dari berbagai macam bidang seperti industri, penelitian, bisnis dan bidang lain yang berkaitan dengan plastik di Australia. KTT ini adalah sebuah upaya pencarian solusi untuk menangani permasalahan limbah di Australia, terutama yang terbuat dari plastik, sebab untuk mengatasi hal ini diperlukannya kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat. Selain dilakukannya pembahasan mengenai bagaimana Australia dapat bergerak maju untuk menciptakan industri daur ulang yang berkembang, forum ini berupaya untuk menciptakan ekonomi sirkular dengan bekerjasama dengan para delegasi yang telah hadir dan terlibat (Plastic Collective, 2020).

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritis yang ada, penulis membuat sebuah hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan perlu diuji kebenarannya. Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **“Jika China mengimplementasikan kebijakan larangan impor sampah melalui *Operation Green Fence*, *The National Sword Policy* dan *Blue Sky* maka Australia menerapkan larangan ekspor serta mengubah sistem pengelolaan limbah padatnya.”**

2.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 2.1

Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas:</p> <p>Jika China mengimplementasikan kebijakan larangan impor sampah melalui <i>Operation Green Fence</i>, <i>The National Sword Policy</i> dan <i>Blue Sky</i></p>	<p>1. China berupaya untuk membatasi jumlah sampah daur ulang yang ilegal dan terkontaminasi melalui <i>Operation Green Fence</i> pada Februari 2013.</p> <p>2. Pada 18 Juli 2017, China mengumumkan larangan terhadap 24 jenis limbah padat kepada WTO yang disebut sebagai <i>The National Sword</i>. Larangan ini diterapkan mulai dari 31 Desember 2017.</p> <p>3. Pada Maret 2018, China mengumumkan kebijakan <i>Blue Sky</i> yang dianggap sebagai tahap kedua dari kebijakan polusi udara sebelumnya yang telah dirilis pada September 2013.</p>	<p>1. Pernyataan Sekertaris Lingkungan, Wong Kam-sing, terhadap pertanyaan Tony Tse Wai-chuen, seorang politikus Hong Kong, mengenai <i>Operation Green Fence</i> dalam jumpa pers di Dewan Legislatif China pada 5 Juni 2013.</p> <p>Sumber: https://www.info.gov.hk/gia/general/201306/05/P201306050252.htm</p> <p>2. Pemberitahuan dari Dewan Negara China mengenai larangan masuk sampah asing yang dinamakan Kebijakan <i>The National Sword</i>.</p> <p>Sumber: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/27/content_5213738.htm</p> <p>3. Dewan Negara China mengeluarkan pemberitahuan mengenai rencana pencegahan dan pengendalian polusi udara yang disebut dengan <i>Blue Sky</i>.</p>

		<p>Sumber:</p> <p>http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-07/03/content_5303158.htm</p>
<p>Variabel Terikat:</p> <p>maka Australia menerapkan larangan ekspor serta mengubah sistem pengelolaan limbah padatnya.</p>	<p>1. Beberapa negara importer sampah Australia mengikuti langkah China dalam menerapkan kebijakan larangan impor sampah.</p> <p>2. Australia sudah memiliki kesadaran dan juga komitmen untuk bertanggung jawab atas limbah domestiknya. Australia akan memanfaatkan hal tersebut sebagai sumber lapangan pekerjaan, inovasi, dan pembawa perubahan yang baik bagi lingkungan sehingga Dewan Pemerintah Australia sepakat untuk menetapkan larangan ekspor limbah padat sebagai langkah pertama untuk mencapai tujuan tersebut.</p> <p>3. Pelaksanaan <i>National Plastics Summit Australia</i> sebagai pencarian solusi dalam menghadapi tantangan limbah plastik di mana setiap gagasan yang dihasilkan dalam KTT ini akan digunakan ke dalam</p>	<p>1. Data ekspor limbah Australia tahun 2018-2019.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.environment.gov.au/system/files/resources/23acbf02-2178-4139-81b0-58adcac4f5cd/files/data-exports-australian-wastes-2018-19.pdf</p> <p>2. Dewan Pemerintah Australia (COAG) telah menyetujui jadwal larangan ekspor sampah secara bertahap yang akan disahkan pada Januari 2021.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.environment.gov.au/protection/waste-resource-recovery/waste-export-ban</p> <p>3. <i>National Plastics Summit</i> dipimpin oleh Menteri Susan Ley di Canberra pada 2 Maret 2020. Forum ini melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintahan sampai dengan individu untuk mencapai tujuannya, yaitu menangani limbah plastik domestik.</p> <p>Sumber:</p>

	<i>the National Plastic Plan</i> yang ditargetkan oleh Pemerintah Australia untuk dilaksanakan pada akhir tahun 2020.	https://www.environment.gov.au/protection/waste-resource-recovery/national-plastics-summit
--	---	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian

